

Pengaruh Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah

Sulis Melaningrum¹, Ana Septiani²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Metro, Kota Metro, Lampung

Email: sulismela01@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mengetahui besarnya pengaruh alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian di lakukan di Desa Goras Jaya dengan jumlah sampel 87 orang responden. Pengambilan sampel menggunakan proporsional randaom sampling, dan teknik pengambilan data dengan menggunakan kuisisioner. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 20. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

The purpose of this study was to determine the magnitude of the influence of the allocation of village funds on the welfare of the community in Goras Jaya Village, Central Lampung Regency. To find out the magnitude of the influence of village policies on the welfare of the community in Goras Jaya Village, Central Lampung Regency. This is to determine the magnitude of the influence of village institutions on the welfare of the community in Goras Jaya Village, Central Lampung Regency. To find out the magnitude of the influence of village fund allocations, village policies, and village institutions on the welfare of the community in Goras Jaya Village, Central Lampung Regency. This research uses quantitative research. The research was conducted in Goras Jaya Village with a sample size of 87 respondents. Sampling using random proportional sampling, and data collection techniques using a questionnaire. The data analysis technique used multiple regression analysis using the SPSS Version 20 application. The results of the study concluded that there was a positive and significant effect of village fund allocation on the welfare of the community in the village of Goras Jaya, Central Lampung. There is a positive and significant influence of village policies on the welfare of the community in the village of

Goras Jaya, Central Lampung. There is a positive and significant influence of village institutions on the welfare of the community in the village of Goras Jaya, Central Lampung. There is a positive and significant influence on the allocation of village funds, village policies, and village institutions on the welfare of the community in the village of Goras Jaya, Central Lampung.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Policy, Village Institutions, Community Welfare

I. PENDAHULUAN

Kurangnya kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan yang masih rendah, dan pemenuhan kebutuhan pokok yang masih kurang. Kondisi seperti ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan otonomi.

Desa adalah sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara. Menurut Tahir (2020: 24) bahwa Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dan dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana desa atau bisa disebut juga dengan dana ADD.

Dana desa dapat bersumber dari bantuan pemerintah dan pendapatan asli desa. Dana yang diperoleh diperuntukkan bagi pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan keperluan lain yang berhubungan dengan desa. Agar dapat terwujud pembangunan daerah yang merata, maka pengelolaan alokasi dana desa atau keuangan desa ini perlu dikelola dengan baik sehingga dana desa yang digunakan dapat tepat sasaran. Pengelolaan dana yang baik akan membawa pada dampak-dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila dana desa dialokasikan secara baik, tepat sasaran dan efisien maka dana desa tersebut akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan

pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi pada kebanyakan desa, alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat masih banyak yang kurang tepat dalam penggunaannya dan kurang tepat sasaran. Banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengalokasikan dana desa bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Tindakan ini banyak ditemui diberbagai masyarakat. Masyarakat banyak mengeluhkan bahwa dana desa yang seharusnya di terima oleh masyarakat yang kurang mampu, justru diterima oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Desa Goras Jaya adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Desa ini merupakan bentuk dari pemekaran wilayah yang semula adalah Dusun III yang terletak di desa Kesumadadi kecamatan Gunung Sugih Selatan. Desa Goras Jaya terbentuk pada tahun 2000 hingga sekarang. Jumlah penduduk di desa Goras Jaya pada tahun 2019 yakni sekitar 3213 jiwa. Adapun secara lebih rinci penduduk di Desa Goras Jaya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa Goras Jaya Tahun 2019

Tahun 2019	Jenis Kelamin		Pendidikan			
	L	P	SD	SMP	SMA	S1 & S2
Jumlah Penduduk	2175	338	935	1019	1138	121
Jumlah Total	3213		3213			

Sumber: Dokumentasi Data Kependudukan Goras Jaya Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas bahwa sebagian besar penduduk di Desa Goras Jaya memiliki riwayat pendidikan lulusan SMP dan SMA. Ada juga penduduk yang dapat menyelesaikan perguruan tinggi. Hal ini menandakan dari tingkat pendidikan di Desa Goras Jaya cukup sejahtera. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat desa Goras Jaya dapat dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan pokok. Kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok ini dapat dilihat dari penghasilan rata-rata yang diperoleh masyarakat selama satu bulan. Hasil prasarvei di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah terhadap 20 orang Kepala keluarga diperoleh data penduduk berdasarkan tingkat penghasilan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Survei Penghasilan Rata-rata Masyarakat Goras Jaya

Penghasilan	Jumlah
< Rp. 1000.000,-	9
Rp.1.000.000 – Rp. 3.000.000	8
> Rp.3.000.000	3

Sumber: Hasil Prasarvei Peneliti melalui wawancara

Berdasarkan Tabel 2 bahwa masih ada masyarakat di Desa Goras Jaya yang memiliki penghasilan di bawah satu juta. Menurut penuturan salah satu kepala keluarga bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya yang terdiri dari 4 orang, penghasilan yang ia

dapatkan masih kurang. Dari keempat anggota keluarganya tersebut masih ada yang berusia sekolah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan makanan juga masih kurang. Melihat adanya hal tersebut maka penduduk di Desa Goras Jaya masih dikatakan kurang sejahtera, sehingga hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan dan penggunaan dana telah diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat di suatu desa dapat terlihat dari kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya seperti kebutuhan pokok (Makan, pakaian, tempat tinggal), kebutuhan pendidikan, dan kemampuan untuk mengembangkan kesejahteraannya itu. Adanya dana desa dipergunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana-dana desa diperuntukkan kesejahteraan masyarakat seperti bantuan dalam pendidikan, kebutuhan pokok, dan sebagainya. Namun, sayangnya alokasi dana desa masih kurang tepat sasaran. Berdasarkan hasil prasarvei terhadap masyarakat bahwa masyarakat masih banyak yang mengeluhkan bahwa dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah masih kurang tepat sasaran. Pihak-pihak yang mendistribusikan dana desa masih bersifat nepotisme dimana mereka masih mementingkan aspek kekeluargaan. Artinya dalam penyaluran dana bantuan desa masih kurang objektif. Banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan dana bantuan desa. Selain itu, pendistribusian dalam alokasi dana desa masih bersifat kurang transparan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan data kuantitatif berupa angka dan diperoleh dari hasil pengukuran. Penelitian ini menghasilkan data alokasi dana desa dan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

Untuk membahas dan memecahkan masalah yang ada serta untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, maka digunakan model analisis regresi sederhana. Dikutip dari Alma (2015:108) yang menyatakan bahwa "analisis regresi sederhana ialah alat analisis peramalan nilai pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup di mana setiap item soal disediakan 5 (Lima) jawaban. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi linier berganda, uji-t, Uji Simultan (F) dan uji R² Determinasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengujian Hipotesis Statistik Uji-t

Tabel 29. Hasil Uji t Parsial (*Output Coefficient*)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7.232	6.579	-	-1.099	.275
Alokasi.D ana.Des	.428	.106	.301	4.042	.000

Kebijakan. Desa	.300	.098	.207	3.053	.003
Kelembagaan. Desa	.606	.086	.519	7.081	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan.Masyarakat

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai uji t pada variabel kreativitas guru dengan taraf signifikansi 5% sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} (4,042) > t_{tabel} (1,990)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai t_{hitung} yang positif menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki hubungan yang searah dengan kesejahteraan masyarakat, artinya jika dana desa dialokasikan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3 juga diperoleh nilai uji t pada variabel kebijakan desa dengan taraf signifikansi 5% sebesar $0,003 < 0,05$ dan $t_{hitung} (3,025) > t_{tabel} (1,990)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan desa terhadap kesejahteraan desa. Nilai t_{hitung} yang positif menunjukkan bahwa apabila desa memiliki kebijakan yang baik dan tepat terhadap dana desa maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan Tabel 3 juga diperoleh nilai uji t pada variabel kelembagaan desa dengan taraf signifikansi 5% sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} (7,081) > t_{tabel} (1,990)$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan desa. Nilai t_{hitung} yang positif menunjukkan bahwa apabila perangkat desa bekerja dengan baik berdasarkan tugas dan fungsinya terhadap dana desa maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji hasil analisis regresi berganda untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3911.61	3	1303.87	59.24	.000 ^a
Residual	1826.79	83	22.010		
Total	5738.41	86			

a. Predictors: (Constant), Kelembagaan.Des, Kebijakan.Des, Alokasi.Dana.Des

b. Dependent Variable: Kesejahteraan.Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis variabel alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi = 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan diketahui nilai $F_{hitung} = 59,241$ dan $F_{tabel} = 2,72$ pada taraf signifikansi 0,05 dan dk pembilang $dk (k-1) = 3$ dan penyebut $(n-k-1) = 82$ sehingga menyebabkan $F_{hitung} (59,241) > F_{tabel} (2,72)$ maka menyebabkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan terima H_a , artinya ada pengaruh alokasi

dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan dalam penelitian ini dapat diwujudkan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Berikut adalah hasil pengujian koefisien determinasi pengaruh antara variabel X terhadap Y .

Tabel 5. Tabel Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.682	.670	4.691

a. Predictors: (Constant), Kelembagaan.Desa, Kebijakan.Desa, Alokasi.Dana.Desa

Berdasarkan tabel 5 di atas diperoleh nilai R^2 sebesar 0,682. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya adalah sebesar 68,2%. Berarti terdapat 31,8% varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

Hasil pengumpulan data dan analisis penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh masing-masing variabel dianalisis baik secara parsial maupun simultan. Adapun pembahasan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Alokasi Dana Desa (X_1) terhadap Kesejahteraan masyarakat (Y)

Hasil pengujian hipotesis pada variabel alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,042 > 1,99$ yang berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang paling dominan dalam mempengaruhi kesejahteraan desa pada aspek alokasi dana desa adalah a) Penggunaan dana desa sesuai UU yang berlaku dan b) Pembangunan menggunakan dana desa direncanakan, dikelola, dan dikendalikan oleh pemerintahan desa Namun indikator pada informasi penggunaan dana desa diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Menurut masyarakat bahwa informasi dana desa belum disampaikan secara transparan kepada warga atau masyarakat Goras Jaya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aditya dan Asep (2019) yang menyebutkan hasil penelitiannya Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung..

2. Pengaruh Kebijakan Desa(X_2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Hasil penelitian selanjutnya terkait dengan variabel kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $3,053 > 1,990$ yang berarti bahwa

ada pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kebijakan desa memiliki pengaruh yang baik terhadap kesejahteraan desa. Indikator yang berpengaruh terhadap kesejahteraan desa adalah adanya komunikasi dan disposisi yang baik perangkat desa Goras Jaya. Sedangkan indikator sumber daya manusia kurang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung dengan penelitian Hisbul Manto (2018) yang memperoleh hasil penelitian Perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut. Kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan dapat menentukan kesejahteraan yang ada di desa.

3. Pengaruh Kelembagaan Desa (X_3) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Hasil penelitian pada variabel kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $7,081 > 1,990$ yang menunjukkan bahwa kelembagaan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan desa berkaitan dengan struktur pemerintahan desa. Perangkat desa dipilih dan ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengelola kebutuhan masyarakat khususnya dalam administrasi desa dan kependudukan. Indikator dari kelembagaan desa yang berpengaruh adalah pada aspek peraturan yang berlaku dan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek yang kurang berpengaruh terletak pada sarana dan prasarana serta kinerja perangkat desa yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini akan berpengaruh pada pendistribusian dana desa. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahir (2016) yang menunjukkan hasil penelitiannya Pengelolaan Keuangan Dana Desa telah mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP). Keuangan desa apabila didistribusikan sesuai dengan aturan maka akan tepat sasaran dan mencapai kesejahteraan desa.

4. Pengaruh Alokasi Dana Desa (X_1), Kebijakan Desa (X_2), dan Kelembagaan Desa (X_3) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Hasil penelitian pada ketiga variabel terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat diketahui nilai $F_{hitung} = 59,241$ dan $F_{tabel} = 2,72$ pada taraf signifikansi 0,05 dan dk pembilang $dk (k-1) = 3$ dan penyebut $(n-k-1) = 82$ sehingga menyebabkan $F_{hitung} (59,241) > F_{tabel} (2,72)$ maka menyebabkan hipotesis nol (H_0) ditolak dan terima H_a , artinya ada pengaruh alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah. Dari ketiga variabel tersebut alokasi dana desa dan kebijakan desa memiliki pengaruh yang dominan dibandingkan dengan kelembagaan desa. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahir (2016) yang menunjukkan hasil penelitiannya Pengelolaan Keuangan Dana Desa telah mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP). Keuangan desa apabila didistribusikan sesuai dengan aturan maka akan tepat sasaran dan mencapai kesejahteraan desa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah..
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah.
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah.
4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Lampung Tengah.

Saran

1. Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan maka disarankan agar Pemerintah Desa Goras Jaya dalam mengalokasikan dana desa harus bersifat terbuka dan menginformasikan kepada warga. Hal ini karena keterbukaan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan rakyat bahwa dana desa telah dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat.
2. Kebijakan desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat maka disarankan agar terus meningkatkan kebijakan-kebijakan desa dengan memperhatikan prinsip kejujuran.
3. Kelembagaan desa berpengaruh paling kuat diantara variabel lainnya maka perangkat desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
4. Kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya cukup baik, namun peneliti memiliki saran agar masyarakat terus memperhatikan dan berkontribusi dalam perbaikan kualitas pemerintahan desa terlebih dalam pengalokasian dana desa, penerapan kebijakan desa, dan kelembagaan desa sehingga tercipta desa yang harmonis..

DAFTAR PUSTAKA

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang APB Desa.

Satono, Agus. 2011. *Manajemen Teori Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.

Sudana. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.